**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,**

**Telp: 0274 - 512688,512820**

**PEMANDANGAN UMUM FAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

***Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*.**

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

* **Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;**
* **Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;**
* **Yang kami hormati Saudara Sekda, beserta jajarannya;**
* **Yang kami hormati Rekan–Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia**

## **Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, dalam keadaan sehat wal’ afiat.**

Mengawali Pemandangan umum ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan pada fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya. Ucapan Terima kasih, juga kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan Penjelasan atas **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021**, pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis Tanggal 16 Juni 2022.

Rapat Paripurna Yang Terhormat

Setelah mempelajari dan mencermati **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021**, perkenankan F-PKB menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD DIY TA 2021, yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY tanggal 8 April tahun 2022. Hal ini merupakan opini WTP yang diraih Pemerintah Daerah DIY untuk keduabelas kalinya, oleh karena itu F-PKB memberikan apresiasi yang positif atas capaian kinerja pemerintah daerah DIY. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK masih memberikan penekanan dan rekomendasi terhadap beberapa permasalahan yang tidak berdampak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada aspek sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. F-PKB mengharapkan agar rekomendasi tersebut segera ditindalanjuti.
2. Berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang antara lain menekankan pada belanja hibah barang belum sesuai petunjuk teknis, belanja modal pada beberapa kontrak belum sesuai ketentuan, dan juga pengelolaan atas BMD (Barang Milik Daerah) belum tertib. Untuk itu, F-PKB mengingatkan agar Pemda meningkatkan system pengendalian internal yang memadai agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
3. Melihat perangkaan berkaitan dengan Target dan realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 raperda tersebut tercatat bahwa pendapatan dianggarkan sebesar Rp 5,67 trilyun dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 5,70 triyun atau 100,50% sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp 28,20 milyar. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 meningkat 1,63% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020. F-PKB mengusulkan agar melakukan perluasan pengembangan usaha berbasis teknologi dan informasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Bahwa kemampuan keuangan daerah pada Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 5,7 trilyun yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari anggaran tersebut, realisasi sebesar Rp 5,53 trilyun atau 91,46%. Hal tersebut menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 554,49 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp70.04 milyar atau 14,45% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 484.45 milyar. Dengan adanya peningkatan SILPA tersebut, F-PKB mengusulkan agar kedepan dalam penyusunan anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, F-PKB setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

Demikian pandangan umum F-PKB, atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

***Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq***

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yogyakarta, 17 Juni 2022  Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  DPRD D.I. Yogyakarta | | |
| Ketua |  | Sekretaris |
|  |  |  |
| Dr. H. Aslam Ridlo, M.AP. |  | Syukron Arif Muttaqin, S.E |